

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pertama, sejak pemerintahan junta militer mulai berkuasa melalui jalan kudeta pada 1962, praktis negeri Myanmar oleh rezim militer berkuasa semakin sulit untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Rakyat Myanmar hanya menikmati pemerintahan yang demokratis dalam sistem tata kelola pemerintahan selama mulai 1948, ketika Inggris memberikan kemerdekaan hingga 1962. Hanya selama 14 tahun lamanya, pemerintahan Myanmar dipilih rakyat berdasarkan konstitusi negara.

Rezim militer mulai berkuasa sejak 1962 melalui kudeta militer dan hingga kini masih tetap berkuasa sebagai pemerintahan yang anti demokrasi. Myanmar menjadi pusat perhatian dunia internasional, karena kekejaman rezim junta militer selama puluhan tahun, sehingga berdampak dalam seluruh aspek kehidupan rakyat Myanmar secara sosial, ekonomi, budaya, politik, agama, hukum dan sebagainya. Rakyat Myanmar mendambakan suatu pemerintahan yang demokratis dan ini berarti harus terjadi transisi pemerintahan rezim militer yang otoriter beralih ke pemerintahan sipil yang demokratis.

Kedua, prasyarat menuju suatu pemerintahan demokratis yang ideal mensyaratkan salah satunya terbebas dari tekanan ekonomi dan politik atau intervensi bangsa asing ke dalam negeri. Namun faktanya, suatu pemerintahan yang belum demokratis selalu menjadi incaran dari berbagai kepentingan tertentu dan intervensi kekuasaan asing. Tragedi Myanmar tidak terlepas dari intervensi

negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis, terutama ekonomi, politik dan militer seperti Cina, India, Rusia dan Amerika Serikat.

Bagaimana suatu negara yang baru saja terlepas dari pasca penjajahan Inggris sudah menikmati pemerintahan yang demokratis selama 14 tahun lamanya, akhirnya mengalami tragedi junta militer yang hingga sekarang masih carut-marut? Selain karena masalah internal situasi ekonomi politik Myanmar yang penuh dengan konflik dan perpecahan antar etnis, kelompok kepentingan, namun yang terpenting juga adalah bagaimana suatu pemerintahan yang benar-benar demokratis bisa mandiri dan berdaulat sepenuhnya, terlepas dari intervensi negara asing.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi, jika memenuhi syarat salah satunya yaitu jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak luar yang anti demokrasi<sup>1</sup> Faktor eksternal intervensi asing seperti negara tetangga dekat Myanmar yaitu Cina dan India, serta AS selaku pemegang kekuatan hegemoni global dan Rusia sebagai eks hegemoni global pasca Perang Dingin seteru AS. Sementara itu, peranan penting PBB hingga sekarang ini masih belum bisa menekan pemerintahan Junta Militer demi tercapainya proses transisi demokrasi yang sebenarnya.

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa terjadinya proses transisi demokrasi dari rezim non-demokratis, salah satunya bisa melalui intervensi yang jarang terjadi yaitu di mana lembaga-lembaga demokrasi dibentuk dan dipaksakan

---

<sup>1</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992 hal. 86.

berlakunya oleh aktor dari luar.<sup>2</sup> Persoalannya apakah terjadinya proses transisi demokratisasi tersebut dilakukan melalui intervensi dan dipaksakan oleh pihak asing berlangsung secara *fair* (tanpa paksaan), ataukah dengan cara-cara demokratis yang memang dikehendaki oleh seluruh rakyat Myanmar?

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan tentang “Hambatan dalam Proses Transisi Demokratisasi di Myanmar” ini adalah untuk:

1. Membuka wawasan dalam kemampuan analisis persoalan politik internasional terutama dalam wacana transisi proses demokratisasi di Myanmar.
2. Menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan praktek yang terjadi di dunia politik internasional, terutama fenomena proses transisi demokratisasi di Myanmar.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sejarah transisi demokratisasi di Myanmar secara kronologis bisa dirunut pada rentang pertama selama 14 tahun sejak dimulainya penjajahan Inggris atas Myanmar pada 1948-1962. Kemudian rentang kedua sejak terjadinya junta militer berkuasa mulai pada 1962, ketika Jendral Ne Win melakukan kudeta militer. Rentang ketiga pasca kudeta militer 1962- sampai pelaksanaan Pemilu 1990 yang

---

<sup>2</sup> Samuel P. Huntington, “Gelombang Demokratisasi Ketiga”, Jakarta, Grafiti Press, 2000.

dimenangkan secara mutlak oleh Partai Liga Nasional Demokratik (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Selanjutnya rentang keempat pada pasca Pemilu 1990 hingga Jendral Than Shwe mulai berkuasa sampai sekarang.

Perhatian dunia internasional dewasa ini dalam konteks betapa rumitnya proses transisi demokratisasi di Myanmar di bawah bayang-bayang sepak terjang Rezim Militer yang sudah berkuasa lebih dari 45 tahun lamanya. Junta Militer pimpinan Jendral Than Shwe berusaha melanggengkan pemerintahan militernya, demi kepentingan utama agar rezimnya tetap berkuasa. Proses demokratisasi di Myanmar pun masih tetap tersamar.

Namun tidak selamanya suatu gerakan menuntut pemindahan kekuasaan segera dari rezim militer ke sipil selalu merupakan suatu langkah politik yang cukup strategis dan efektif. Salah satu buktinya adalah gerakan yang dilancarkan oleh kelompok oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi yang menuntut pergantian pemerintahan Rezim Militer Myanmar di bawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe<sup>3</sup>

Semakin jelas suatu gerakan kelompok oposisi LND itu memperjuangkan pemerintahan yang demokratis, justru semakin kuat pula pemerintahan rezim militer Myanmar dengan cara Junta Militer memberangus aksi demonstrasi damai dengan tindakan kekerasan yang menewaskan belasan demonstran. Selain kelompok oposisi LND, kaum Biksu juga memotori aksi demonstrasi yang sama karena dipicu oleh melambungnya harga bahan bakar minyak mencapai 500%

---

<sup>3</sup> Hendrajit, Aksi Destabilisasi di Myanmar , 7 Oktober 2007, dalam [http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=10453](http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=10453) diakses pada tanggal 25 Januari 2008.

yang harus ditanggung masyarakat di tengah ekonomi rakyat yang semakin merosot. Ironisnya korupsi dan pasar gelap merajalela di kalangan militer dan pejabat Myanmar.

Situasi ekonomi politik Myanmar yang demikian merosot semakin diperparah dengan oleh persaingan kepentingan strategis Cina, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Mereka menanamkan pengaruhnya terhadap Myanmar atas kepentingan strategis baik secara ekonomi, politik dan militer. Sebenarnya dukungan negara tetangga seperti Cina, India dan Rusia, selama ini memang kurang antusias dalam menekan Junta Militer karena mereka punya kepentingan yang riil di Myanmar.

Cina merupakan mitra dagang terbesar Myanmar yang juga pemasok senjata bagi tentara Myanmar. India juga berkepentingan secara strategis secara ekonomi dan politik dengan Myanmar. Semula India mau membantu perjuangan pro-demokrasi dengan Myanmar, namun demi kekuatan dan kepentingan yang lebih pragmatis, India berusaha mendekati Junta Militer dengan harapan bisa menjauhkan pengaruh Cina. Rusia pun berkepentingan dengan penjualan senjata dan peralatan perang ke Myanmar.<sup>4</sup>

Kini dunia internasional masih menunggu ketidakpastian politik Myanmar yang semakin tidak menentu. Di sebuah negara tertutup yang dipimpin oleh Junta Militer, apa saja bisa terjadi setiap saat. Untuk mengurangi eskalasi kecaman luar negeri terhadap perkembangan politik dalam negeri, Junta Militer memblokir arus

---

<sup>4</sup> I Basis Susilo, "Upaya Internasional Mengubah Rezim di Myanmar", Pusat Informasi Kompas (PIK), Kompas, Edisi Kamis 1 November 2007 Hal.6.

informasi keluar dari Myanmar, melarang terbit koran dalam negeri yang tidak sepaham dengan pemerintah, dan tidak mengizinkan orang asing masuk ke Myanmar.

Setelah berhasil melakukan kudeta pada 1962 di bawah komando Jenderal Ne Win, Junta Militer menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap pihak asing yang bisa merongrong budaya, bahasa, tradisi dan agama bangsa Myanmar. Junta Militer mengusir kelompok pedagang imigran Cina dan India yang merupakan penggerak ekonomi negeri itu. Alasannya, hanya sosialisme yang akan membebaskan ketergantungan ekonomi dari negara maupun bangsa lain. Namun terbukti di kemudian hari langkah ini salah total. Pada 1987 Myanmar oleh PBB dikategorikan salah satu dari 10 negara terbelakang di dunia.

Junta Militer juga menunjukkan sikap yang sama, ketika LND memenangkan Pemilu 1990 di mana lebih dari  $\frac{3}{4}$  total jumlah kursi parlemen. Bagi junta, ini adalah sejarah yang salah arah. Aung San Suu Kyi mestinya tidak mampu memenangkan pemilu yang dijaga ketat oleh aparat militer. *State Law and Order Restoration Council (SLORC)*, begitu pemerintah Myanmar beranggapan dan sangat yakin memenangkan Pemilu 1990. Karena hasil Pemilu ini bertentangan dengan keinginan Junta, maka dinyatakan batal.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fred Weston, *Tragedi Myanmar*, Tuesday, 02 October 2007, Diterjemahkan oleh Ted. Sumber: "Tragedy of Myanmar" oleh Fred Weston (In Defence of Marxism, [www.marxist.com](http://www.marxist.com)), 27 September 2007. dalam <http://www.marxist.com/tragedi-myanmar.htm> diakses pada tanggal 27 Januari 2008.

Persoalan mendasarnya adalah begitu peliknya upaya menuju proses demokratisasi Myanmar yang tidak serta merta secara langsung memberikan penyelesaian masalah, jika terjadi proses transisi demokratisasi dengan adanya pergantian rezim militer ke sipil. Ternyata banyak faktor yang menghambat jalannya proses transisi demokratisasi yang harus dihadapi oleh masyarakat Myanmar dalam memperjuangkan suatu pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan Myanmar yang demokratis artinya terjadi pergantian kekuasaan dari rezim militer ke pemerintahan sipil. Namun di sisi lain, setiap proses pergantian kekuasaan juga belum tentu menjanjikan perubahan di setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang lebih baik dari rezim sebelumnya.

#### **D. Pokok Permasalahan :**

Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan utama dalam proses transisi demokratisasi di Era Pemerintahan Junta Militer Than Shwe di Myanmar?

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Transisi Demokrasi**

Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan awalnya berasal dari para filsuf Yunani. Konsep demokrasi sendiri dalam perkembangannya menjadi konsep yang paling ideal bagi sistem pemerintahan di suatu negara, karena dianggap lebih mengutamakan persamaan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme. Secara umum demokrasi dapat dipahami sebagai “*The Government or Rule by the People*”, artinya rakyat yang berkuasa.<sup>6</sup> Menurut Abraham

---

<sup>6</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jilid 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.

Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people, for the people*).<sup>7</sup>

Demokratisasi merupakan suatu proses menuju demokrasi dan didefinisikan sebagai proses pergantian dari struktur politik otoriter menjadi sistem politik yang kedaulatannya meluas dan dipraktekkan oleh rakyat.<sup>8</sup> Tujuan demokratisasi adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berpolitik. Ciri utama proses demokratisasi ialah terjadinya pergeseran dari rezim otoriter yang membangun sistem hegemonik tertutup yang tidak memberi ruang partisipasi publik ke arah sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.

Sebuah tanda dimulainya masa transisi adalah ketika pemerintahan otoriter dengan alasan apapun mulai memodifikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok, proses tersebut disebut liberalisasi.<sup>9</sup> Menurut Samuel P. Huntington, proses demokratisasi dari rezim non-demokratis ke sistem politik yang lebih demokratis terbagi dalam beberapa proses, meliputi :

1. Transformasi (Reforma) yaitu proses demokratisasi terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori perwujudan demokrasi.

---

<sup>7</sup> Masdar, Ummarudin, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

<sup>8</sup> Gramae Gill, Liberalization and Democratization ini The Union and Russia, Democratization, Vol.2 No. 3, Autumn, 1995 hal 315.

<sup>9</sup> George Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 108.

2. *Replacement* (Ruptura) yaitu proses demokrasi terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokratisasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan.
3. *Transplacement* (Ruptforma) yaitu proses demokratisasi terjadi jika demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintahan dan kelompok oposisi.
4. Intervensi yakni proses demokratisasi yang dipaksakan oleh kekuatan asing dengan menumbangkan rezim otoriter yang sedang berkuasa.<sup>10</sup>

Menurut Gulermo O. Donnell, sebuah proses transisi menuju demokrasi ini dibutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Adanya keberhasilan *recovery of economy*.
2. Keberhasilan kelompok-kelompok pembaharu dalam menduduki posisi-posisi penting dalam kekuasaan dari kelas menengah dan masyarakat sipil.
3. Dukungan dari pihak-pihak luar yang berpengaruh dalam kebijakan ekonomi, politik dan keamanan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat yang majemuk, dinamis dan modern.
  - b. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
  - c. Adanya Pemilu yang adil dan jujur.

---

<sup>10</sup> Samuel P. Huntington. Opcit hal 147.

- d. Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi di dalam beberapa subkultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpinnya harus berhasil dalam menciptakan satu tatanan konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik subkultur.
- e. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi.<sup>11</sup>

Menurut Samuel P. Huntington, ada beberapa faktor yang menghambat proses demokratisasi di sebuah negara, yaitu :

1. Politik merupakan sebuah penghalang yang secara potensial signifikan menghalangi perkembangan demokratisasi di negara-negara yang masih otoriter dan akan menjadi konservatif yang dengan gigih menentang demokratisasi. Konflik politik yang terjadi di antara elit juga berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi, sebab jika elit tidak solid demokrasi juga sulit terlaksana.
2. Budaya yaitu tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis, tentunya akan menghambat penyebaran norma-norma demokrasi di dalam masyarakat, yang tentunya tidak akan memberikan legitimasi yang kuat pada lembaga-lembaga demokrasi tersebut secara efektif.
3. Ekonomi yaitu kemiskinan juga merupakan penghalang demokratisasi di suatu negara, karena demokrasi sangat tergantung pada perkembangan ekonomi suatu negara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Robert A. Dahl, *Opcit* hal.86.

<sup>12</sup> Samuel P. Huntington, *Opcit* hal.381-404.

Dinamika kehidupan ekonomi dan politik masyarakat Myanmar secara umum berpengaruh pada proses transisi demokratisasi itu sendiri. Masyarakat Myanmar selama ini merasa tidak puas terhadap perkembangan kondisi politik dan ekonomi yang semakin memburuk. Masyarakat Myanmar selama ini juga gencar melakukan demonstrasi besar-besaran yang mendapatkan dukungan dari kelompok oposisi Liga Nasional Demokrasi / LND (*The National League for Democracy/ NLD*) pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi tokoh utama dalam partai tersebut. Hingga pada 1988 demonstrasi besar-besaran tersebut menyebabkan Jendral Ne Win mengundurkan diri. Kemudian digantikan Jendral Sein Lwin yang justru melakukan tindakan kekerasan yaitu tindakan pembantaian terhadap kelompok demonstran. Pada tahun ini pula Jendral Sein Lwin mengundurkan diri dan digantikan oleh Saw Maung yang kemudian menyelenggarakan Pemilu, namun tetap memberlakukan Undang Undang Darurat dan membekukan Konstitusi 1974.

Dinamika politik 1990 yang mempengaruhi proses transisi demokrasi ditandai dengan kemenangan partai LND dalam Pemilu 1990, karena mampu menggalang dukungan dari 2 juta penduduk Myanmar selama masa kampanye sebelumnya. Kemenangan Partai LND dalam Pemilu 1990 tersebut adalah kemenangan kelompok oposisi yang jelas mengancam eksistensi pemerintahan Junta Militer yang berkuasa selama ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran dari kubu pemerintah Junta Militer yang kemudian membuat Jendral Maung secara sepihak tidak mengakui hasil Pemilu dan memenjarakan sejumlah besar anggota LND. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum militer dan pembatalan

Pemilu 1990, telah memunculkan isu pelik transisi demokratisasi di Myanmar, pelanggaran HAM terhadap tokoh-tokoh demokrasi terutama Aung San Suu Kyi dan kaum minoritas sebagai isu internasional. Pemilu 1990 bisa dikatakan sebagai tonggak utama dalam upaya proses transisi demokratisasi di Myanmar. Namun Junta Militer menolak hasil Pemilu tersebut dan justru semakin berupaya mempertahankan pemerintahan diktatornya secara represif.

Situasi semakin memburuk ketika Aung San Suu Kyi mulai diambil paksa dari rumahnya dan dipenjarakan pada 1995 yang artinya proses transisi demokratisasi di Myanmar menjadi terhambat. Langkah Junta Militer memenjarakannya didasarkan pada terlalu percaya dirinya Rezim terhadap prospek kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik Myanmar di masa depan. Kemudian SPDC (Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara) dan kelompok-kelompok oposisi (LND dan Aliansi Demokrasi Burma) menemui jalan buntu dalam bekerja sama dan tidak berhasil menyetujui syarat-syarat rekonsiliasi nasional dan modalitas demokratisasi. Namun pada awal 2000, situasi kemunduran ekonomi memaksa pemerintahan Junta Militer mengambil langkah untuk berunding dengan Aung San Suu Kyi. Hal ini tentu saja berimplikasi secara meluas pada persoalan ekonomi-politik dan pengaruhnya terhadap transisi demokrasi di Myanmar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ardeth Maung Thawngmung, *Preconditions and Prospects for Democratic Transition in Burma/Myanmar*, *Asian Survey* May/June 2003, Vol. 43, No. 3, Pages 443–460, Posted online on December 2, 2003. (doi:10.1525/as.2003.43.3.443)

Situasi kemunduran ekonomi pada 2000 saat itu merupakan salah satu hambatan mewujudkan transisi demokrasi yang kemudian diperparah dengan kediktatoran pemerintahan junta militer secara kekerasan. Namun situasi kemunduran ekonomi memaksa pihak Junta Militer untuk berunding dengan kelompok oposisi LND. Pada 2004, SPDC yang dipimpin oleh Jendral Than Shwe berupaya untuk membentuk suatu negara demokratis demi kepentingan rakyat dan keamanan.

Kemudian sebuah konvensi nasional menuju demokrasi diselenggarakan dan anggotanya dipilih oleh SPDC. Konvensi ini merupakan jawaban atas tuntutan komunitas internasional. Dengan adanya perkembangan baru di Myanmar ini, perhatian komunitas internasional dihadapkan pada pilihan-pilihan yang baru dalam menatap masa depan demokrasi di Myanmar. Aliansi Demokrasi Myanmar, kelompok-kelompok etnik non-Myanmar dan kelompok-kelompok etnis minoritas kini telah bertarung untuk menentukan sistem politik dan masa depan dengan SPDC sebagai pemegang kekuasaan tunggal.

Isu Myanmar yang utama adalah masalah internal penegakan demokrasi yang diprakarsai oleh beberapa kelompok partai dengan dukungan masyarakat luas yang berakhir pada pelanggaran dan kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Junta militer Myanmar. Myanmar mendapatkan perhatian dan reaksi keras dari dunia internasional dan menjadi sebuah isu global. Namun situasi politik domestik Myanmar tampaknya semakin jauh dari harapan

---

untuk menjadi demokratis dan rasa kekecewaan pun timbul setelah pemerintah Junta Militer Myanmar mengeluarkan kebijakan untuk kembali memasukkan Aung San Suu Kyi bersama beberapa pimpinan LND ke penjara rumah pada pertengahan 2003.

Situasi politik domestik yang dikuasai Junta Militer belakangan ini semakin memanas karena ada kekuatan asing di belakang semua ini. Myanmar sedang dalam proses demokratisasi yang disusupi oleh pihak asing. Mengapa ASEAN tidak peduli terhadap keadaan di Myanmar, karena sudah ada perjanjian antar negara ASEAN tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga negara anggota ASEAN yang lain (prinsip non-intervensi).

Proses demokratisasi yang baik seharusnya didasarkan atas tiga hal, yaitu basis ekonomi rakyat yang kuat, *Gross National Product* (GNP) yang tinggi, serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan model skenario demokratisasi versi Huntington dibagi menjadi tiga bagian, yakni *replacement*, *transplacement*, dan *intervensi*. Untuk kasus Myanmar, skenario terjadinya proses demokratisasi yang sedang berlangsung terjadi dalam model intervensi.

Dimulai dari pihak-pihak pro-demokrasi kemudian para biksu dan masyarakat. Walaupun pada akhirnya proses semacam ini tidak akan menghasilkan proses demokrasi yang *smooth*. Keadaan tersebut tidak menuju ke arah sebagai titik tolak keruntuhan Rezim Militer di Myanmar. Junta militer tidak akan runtuh, kecuali jika akhirnya Junta Militer bisa berkompromi dengan dunia internasional. Penyelesaian yang mungkin dilakukan oleh Myanmar ialah antara

dua pilihan. Pertama, Junta Militer akan tetap menjadi Junta Militer. Kedua, Junta Militer berkompromi dengan dunia internasional dan memberikan sebagian kekuasaannya, kemudian melaksanakan pemilu, memberikan legitimasi hasil pemilu dan menerima Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin jika terpilih dalam Pemilu Myanmar.

## **2. Teori Hegemoni Regional**

Pada dasarnya Teori Hegemoni Gramsci menjelaskan mengapa suatu kelompok atau kelas secara sukarela atau dengan konsensus mau menundukkan diri pada kelompok atau kelas yang lain. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma-norma penguasa. Lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

Ada tiga tingkat Hegemoni menurut Gramsci seperti yang diungkapkan oleh Joseph Femia :

1. Hegemoni Integral, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis.

2. Hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi "di bawah permukaan kenyataan sosial". Artinya sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sarannya, namun pemikiran yang dominan dari subyek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh.
3. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan dengan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan "negara baru" yang di cita-citakan kelompok hegemonis itu.<sup>14</sup>

Teoritisi stabilitas hegemoni membedakan definisi hegemoni dengan menekankan pentingnya kapasitas kekuatan militer untuk mengendalikan tatanan dunia dan kapasitas kekuatan ekonomi untuk menentukan dan mendikte aturan yang mengendalikan perdagangan, keuangan dan investasi internasional. Teori stabilitas hegemoni menerangkan mengapa negara-

---

<sup>14</sup> Gunawan, Berdiskusi Tentang Hegemoni dalam [http://bung-gun.blogspot.com/2006\\_12\\_04\\_archive.html](http://bung-gun.blogspot.com/2006_12_04_archive.html) diakses pada tanggal 3 April 2008.

negara hegemonik di hirarki tertinggi, seperti AS pasca Perang Dunia II, termotivasi untuk mempromosikan suatu rezim internasional yang menguntungkan bukan hanya menguntungkan diri tetapi juga negara lain.<sup>15</sup>

Hegemon adalah suatu negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar di lingkungan global atau regional. Dalam perspektif hegemoni, negara hegemon global akan senantiasa mencegah lahirnya hegemon-hegemon regional yang perilakunya bebas dan tidak terkendali. Bagi hegemon global, semua negara harus tunduk pada kemauannya. Semakin tidak dapat dikontrol perilaku suatu negara, akan semakin besar pula tekanan hegemon terhadap mereka. Semakin besar perbedaan cara pandang antara hegemon global dan hegemon regional, semakin besar pula ketegangan politik yang akan terjadi di antara mereka.<sup>16</sup>

Hegemoni adalah terkonsentrasikannya sebagian besar kekuasaan yang ada di satu kutub dalam sistem internasional. Hegemoni adalah konfigurasi yang stabil karena adanya keuntungan yang diperoleh negara adikuasa yang dominan dan negara-negara yang lain dari satu sama lain dalam sistem internasional.<sup>17</sup>

Dalam konteks hegemoni kekuatan intervensi negara-negara asing di Myanmar, maka konsep hegemoni regional berkaitan dengan upaya menanamkan

---

<sup>15</sup> Asep Setiawan, Perspektif-Perspektif Hubungan Internasional, *The World Politics Analysis, Theory and Opinion*, International Relations Theories dalam <http://www.the-worldpolitics.com/?m=200704> diakses pada tanggal 3 April 2008.

<sup>16</sup> *Mustofa B Santoso, Opini: Rudal Shahab-3 Iran dan Politik Hegemoni AS* Senin, 01 November 2004 dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/01/opini/1356866.htm> diakses pada tanggal 3 April 2008

<sup>17</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasional) diakses pada tanggal 3 April 2008

kekuasaan ekonomi, politik dan militer dalam memperebutkan kepentingan strategis negara tersebut di wilayah Myanmar. Berkaitan dengan konflik Myanmar yang terjadi dalam perebutan kekuasaan intervensi negara-negara asing dalam mempertahankan kekuasaan hegemoni di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, Cina harus berhadapan dengan India sebagai negara hegemon regional di kawasan Asia Selatan untuk berebut pengaruh dan menanamkan kekuasaannya di Myanmar. Cina juga harus berhadapan dengan AS sebagai negara adikuasa tunggal pasca Perang Dingin pemegang hegemoni global. AS tidak akan membiarkan Cina begitu saja menjadi negara hegemon regional baru di kawasan Asia sebagai pesaingnya.

Para analis militer dan sipil Cina memandang kebangkitan multipolaritas sebagai sebuah cara untuk mengimbangi pandangan AS dalam upaya untuk menjadi suatu kekuatan hegemoni global. Persepsi Cina ini didasarkan pada pandangan bahwa pasca-Perang Dingin, perimbangan kekuatan yang telah berubah menjadi "satu adidaya banyak kekuatan besar" atau "satu polar banyak kekuatan" di mana kekuatan-kekuatan besar lain harus bisa menjadi pengimbang kekuatan satu adidaya tersebut.<sup>18</sup>

Pemerintahan Cina merupakan salah satu negara hegemon regional dalam situasi penuh konflik kepentingan di Myanmar. Fakta bahwa 35 % dari impor

---

<sup>18</sup> Rene L. Pattiradjawane, Buku Putih Pertahanan RRC Memusatkan Pertahanan Pada Ekonomi, 26 Oktober 2000 dalam [http://www.pattiradjawane.com/index.php?option=com\\_content&task=section&id=4&Itemid=26](http://www.pattiradjawane.com/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=26) diakses pada tanggal 4 April 2008

Myanmar datang dari Cina menggarisbawahi pengaruh yang dimiliki Cina terhadap Rezim Militer Myanmar. Terdapat suatu pertentangan untuk meraih pengaruh di Myanmar, antara AS dan Cina. India juga memiliki kepentingan di Myanmar dan berkompetisi dengan Cina untuk meraih kontrol terhadap sumber daya alam di Myanmar.

AS ingin menekan Cina keluar dan memasang sebuah rezim "demokratis" yang akan lebih penurut terhadap tuntutan-tuntutan imperialis. Rezim seperti ini akan menjalankan berbagai kebijakan Bank Dunia dan IMF. Namun Cina menghalangi resolusi DK PBB soal Myanmar. Cina menerapkan diplomasi diam-diam dalam menghadapi tekanan publik yang tidak kentara terhadap Junta Militer. Josef Silverstein, ahli ilmu politik dan penulis buku tentang Myanmar, mengatakan, kekacauan sipil tidak masuk dalam kamus kepentingan Cina. "Cina sangat menginginkan situasi damai di Myanmar untuk menyelesaikan proyek jalan dan rel kereta api guna mengembangkan pertambangan dan mengasimilasi Myanmar di bawah kontrol ekonomi Cina," katanya.<sup>19</sup>

Peran Cina dan Rusia dalam mendukung Rezim Junta Militer dilakukan dengan cara menghalangi Resolusi DK PBB tentang Myanmar. Sementara itu dalam proses transisi demokrasi di Myanmar, peran India sejak awal menjadi penting bagi Myanmar untuk mendukung pembaruan demokrasi. Namun

---

<sup>19</sup> Kompas Cyber Media, Selasa 25 September 2007, Pemrotes Capai 100.000 Orang dalam <http://64.203.71.11/ver1/Internasional/0709/25/021908.htm> diakses pada tanggal 4 Oktober 2007.

kebijakan pemerintah India kemudian berubah, setelah melihat peran dan kepentingan strategis Cina di Myanmar. India melihat Myanmar sebagai jembatan kritis yang menghubungkan wilayah tetangganya kawasan timur laut secara dinamis. India juga melihat kerja sama tapal batas yang lebih besar yang berkaitan dengan perbatasan penting di wilayah timur laut. Hampir keseluruhan 12 negara bagian timur laut India mengalami gangguan gerakan separatis dan New Delhi memperingatkan Junta Militer yang membasmi pemberontakan Myanmar.

Cina memiliki kunci kepentingan strategis dalam stabilitas Myanmar dan mengikat erat pemerintahan Rangoon. Pemerintah India melihat ikatan yang lebih kuat lagi dengan Rezim Militer Myanmar untuk menghadapi pengaruh Cina yang berkembang pesat di Myanmar. Sumber daya energi Myanmar, yaitu minyak dan hasil pertambangan lainnya menjadi daya tarik bagi mitra dagang seperti Cina, India dan Rusia.

Transisi demokrasi sebenarnya membutuhkan pengaruh tekanan internasional yang memadai dari Cina, India dan Rusia. Kemudian sanksi AS dan Uni Eropa siap diterapkan dan berpengaruh besar bagi keseluruhan ekonomi Myanmar, namun gagal untuk membujuk Rezim Militer Myanmar. Banyak pengamat yakin bahwa pemerintahan militer menunda-nunda untuk transisi demokrasi dengan harapan memperoleh perhatian internasional melalui 7 tahap Peta Jalan Demokrasi (*Road Map to Democracy*) yang disebut dengan “*disciplin-flourishing democracy*”, suatu proses kontroversial yang tajam dan lambat.

Kini masa depan politik Myanmar berada di simpang jalan dan penuh ketidak pastian. Sementara itu 2 pejabat militer puncak Myanmar, Than Shwe dan Maung Aye, sama sekali tidak berniat untuk memperbaharui demokrasi di Myanmar. Bahkan terjadinya proses demokratisasi tergantung pada inisiatif Cina. Jika Cina berhasil menekan kedua jendral itu, akan menyebabkan perubahan bagi Cina untuk mempertimbangkan pengaruhnya pada sang jenderal. Hal ini saat yang tepat untuk mengambil alih Junta Militer untuk proses transisi demokrasi. Kerja sama antara India dan Cina dapat memainkan peranan utama di Myanmar. Para biksu Buddha di Myanmar menjadi faktor penentu juga dan membutuhkan dukungan eksternal demi keberhasilan pembaharuan demokrasi di Myanmar.<sup>20</sup>

Proses demokratisasi di Myanmar kini makin menghadapi persoalan serius dan memperoleh banyak perhatian di kalangan komunitas internasional. Berbagai pihak terutama PBB telah menyerukan Peta Jalan Demokrasi yang sesungguhnya bagi masa depan Myanmar yang lebih demokratis. Namun apa daya, masih ada saja faktor-faktor utama baik secara internal maupun eksternal yang menghambat jalannya proses transisi demokratisasi di Myanmar.

#### **F.Hipotesis :**

Terjadinya hambatan dalam proses transisi demokratisasi di Myanmar, karena adanya peran Junta Militer yang begitu kuat dan solid, dan intervensi negara asing dengan yang memiliki kepentingan ekonomi, politik dan militer seperti Cina, India, Rusia dan AS.

---

<sup>20</sup> *Perspective, International Pressure and Military Rule in Myanmar*, Dr Veena Tyagi, MMH College, Meerut University.12.Desember 2007. dalam <http://indiapost.com/article/perspective/1589/> diakses pada tanggal 4 April 2008

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan data yang berupa pernyataan, *statement* yang bersifat kualitatif, bukan kuantitas untuk dijadikan variabel pemahaman. Teknik analisisnya secara deskripsi eksplanatoris yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang aktual. Kemudian memberikan penjelasan obyektif menurut fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis, dan menginterpretasikannya untuk mencapai kesimpulan. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (*Library Research*) dengan bahan pustaka seperti buku, jurnal, buletin, surat kabar, serta media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan relevan.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini mengambil rentang waktu penelitian mulai dari upaya proses transisi demokrasi melalui Pembentukan Peta Jalan Demokrasi (2003) sampai Pemberlakuan Referendum Konstitusi (2008) di Era Pemerintahan Junta Militer Pimpinan Jendral Than Shwe.

## **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I.** Merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah, yang terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hi-

potesis, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II.** Membahas tentang gambaran umum Myanmar. Pokok bahasannya meliputi geopolitik, ekonomi dan dinamika politik di Myanmar.

**BAB III.** Membahas tentang gerakan pro demokrasi di Myanmar dan kepentingan Asing di Myanmar.

**BAB IV.** Membahas tentang Peran Junta Militer dan Kepentingan Strategis Cina: Hambatan Utama menuju Transisi Demokrasi Myanmar.

**BAB V.** Berisikan kesimpulan dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.